



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RONY ARMANDHO BARITO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
3. NHK : **999387**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/249 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 148.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B6H-AI A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B3W A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOTOR, YAMAHA B6H AT A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. MOTOR, YAMAHA V 100 E ALPHA II Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
7. MOTOR, HONDA ASTREA STAR Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
8. MOTOR, HONDA C-70 E Tahun 1969, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



9. MOTOR, YAMAHA LS 3 Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 485.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 485.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.